

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

Miftahul Huda

1700024005

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

2023

JOURNAL

**THE ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW IN WASTE
MANAGEMENT AS THE MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF
GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN YOGYAKARTA CITY**



By:

Miftahul Huda

1700024005

**Submitted as Partial Fulfilment of Requirements for the Attainment of *Sarjana*
Hukum Degree**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA**

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG
PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA YOGYAKARTA**

Miftahul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Lingkungan dalam tata pengelolaan sampah di Kots Yogyakarta yang sesuai dengan prinsip Good Environmental Governance.

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses menulis penelitian ilmiah ini yaitu menggunakan jenis penelitian Normatif (Normative Legal Research). Jenis penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mengkaji kualitas dari norma Hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian Hukum Normatif diklafikasi sebagai penelitian Kualitatif.

Hasil penelitian dari penulis adalah bahwa dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pencemaran Lingkungan Hidup alibst sampah adalah kurangnya kedadaran masyarakat serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga mumpuni selain itu kurangnya peraturan yang mengatur denga tegas kepada para pelaku pencemaran Lingkungan Hidup akibat sampah jadi perlu adanya aturan yang kongkrit untuk membuat efek jera bagi pelaku pencemaran Ligkungan Hidup akibat sampah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan Peraturan Daerah Pengelolan Sampah.

THE ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW IN WASTE MANAGEMENT AS THE MANIFESTATION OF THE PRINCIPLE OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN YOGYAKARTA CITY

Miftahul Huda

ABSTRACT

This research aimed to establish the Environmental Law Enforcement in waste management in Yogyakarta City which was in accordance with the principle of Good Environmental Governance.

The type of research used in the process of writing this research was Normative Legal Research. Normative Legal research was research aimed at examining the quality of the legal norms. So therefore, Normative Legal research was often classified as Qualitative research.

The results showed that one of obstacles in enforcing law against environmental pollution caused by waste was a lack of public awareness and a lack of qualified human resources. Apart from that, there was a lack of regulations that strictly governed the perpetrators of environmental pollution caused by waste. So ,it was necessary to have concrete regulations to create a deterrent effect for perpetrators of environmental pollution caused by waste.

Keywords: Enviromental Law Enforcement, Regional Regulations, Waste Management.

A. Pendahuluan

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Waluyo dkk, 2012 : 3).

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 Undang-Undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah, (Yustisia. Vol.4 No. 3:2019) Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa:“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan seperti inilah maka perubahan atas Undang-Undang

Nomor.3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh landasan yuridis konstitusional yang jelas. Bahkan telah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut,(Gie,1993:33).

Penyelenggaran otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Implikasinya terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke

daerah. Adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Haikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD. (Moenta & Pradana, 2018: 28). Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah mengatur dan mengelola untuk kepentingan masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya, dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya. (Ubedilah, 2000: 170). Berlakunya otonomi daerah maka daerah otonom dapat

mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-malmasalah publik (public issues) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. (Supriatna, 1996: 21), diantaranya adalah masalah lingkungan hidup.

B. . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Koyta Yogyakarta ?
2. Apakah penegakan Hukum Lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sesuai prinsip Good Environmental Governace?

C. Metode Penelitian

Jenis dan penelitian yang akan digunakan dalam proses menulis penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian hukum normatif diklafikasi sebagai penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hendrik Mezak, 2006: 86).

D. Pembahasan

Dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep Plato yang dikenal dengan "nomoi" yang menyatakan bahwa penyelenggaraan. Negara

yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa Good Governance. Governmental Liability berbeda dengan istilah State Liability JJ Van Der Gouw mengatakan bahwa baik Negara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dewan aie maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas Pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (legal person) yang dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi.

Tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan dalam suatu implementasi kebijakan publik, Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan.

Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah masalah politik dan sosial sekarang ini. pada tataran tertentu analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik terutama dalam perumusan kebijakan terkait dengan pengelolaan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan memiliki Tanggung Jawab, Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung

jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Disisi lain pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, faktanya masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta. Terbukti dengan semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk melakukan pengelolaan sampah demgn begitu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya: Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan di tempat pembuangan akhir.

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber,

TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir). Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang sangat besar, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemanasan global.

Perwujudan nyata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta di Tempat Pembuangan

Akhir Piyungan (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Piyungan. Sebagai pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini

berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dengan adanya asas tanggung jawab tersebut seharusnya pemerintah Kota Yogyakarta selaku pemangku kebijakan dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Terkait dengan pelayanan publik, diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a) Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b) Penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari

komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain

itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. (2007). *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, (2018). *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. (2016). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiono. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Program Pascasarjana UNS.
- Siagian, Sondang P. (2007). *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, NHT. (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Supriatna, Tjahya. (1996). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ubedilah, (2000). *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for CivicEducation.
- Utami, Eka. (2013). *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Uniliver Indonesia.

- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), him.
- Parulian Donald, (1997), "Mengugat Pemilu". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Panjaitan, Merphin, (2014) logika demokrasi "menyongsong pemilihan umum tahun" Permata Aksara : Jakarta., 2013.
- Ramlan Surbakti, (1992), "Memahami Ilmu Politik", Jakarta : PT Grasindo.
- Republik Indonesia, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2002, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI 2002), hlm. 797-800.
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Gramedia, 2000, hlm
- Samuel Huntington, (1997), "Gelombang Demokrasi Ketiga", Jakarta, Grafiti.
- Soerjono Soekanto, (1989) Perbandingan hukum. Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarjati Hartono, (1988) Kapita Selekta perbandingan hukum. Bandung PT Citra Aditya Bakti.
- Tim Pokja UIN Sunan Kalijaga, (2005), "Pancasila dan Kewarganegaraan", Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, (2004), "Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi", Murai Kencana, Jakarta.

B.PERUNDANG-UNDANGAN

[Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.](#)

[Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.](#)

[Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.](#)

[Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah kota yogyakarta nomor 10 tahun 2012 atas perubahan perda no 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah](#)

JURNAL

Arsanti, Vidyana dan Sri Rum Giyarsih. (2012). Pengelolaan Sampah oleh

Masyarakat Perkotaan di Kota Yogyakarta. Jurnal Sains dan Teknologi

Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Januari, doi: [https:// journal.uui.ac. id/ JSTL/article/view/4692/4135](https://journal.uui.ac.id/JSTL/article/view/4692/4135)

Asiyah, Nur. (2019), Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember, doi: [https:// ejurnalunsam. Id/ index.php/ jhsk/ article/ download/ 1920/ 1467/](https://ejurnalunsam.Id/index.php/jhsk/article/download/1920/1467/)

Dobiki, Joflius. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau

Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Spasial. Volume 5 Nomor 2, doi: [https:// ejournal. Unsrat.ac.id/ index.](https://ejournal.Unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/20803/20494)

[Php/ spasial/ article/download/20803/20494](https://ejournal.Unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/download/20803/20494)

Hilmi Alwi Addahlawi, et. Al., (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Volume 8 Nomor 2 Desember, doi : doi.org/10.21009/jgg.082.04

- Nasution, M.Y.F. Hafidz. Et. Al., (2022), Sosialisasi Penegakan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan, Jurnal Abdi Mas Adzkia, Volume 02, Nomor 02, JuliJanuari, doi: <http://jurnal.Uinsu.ac.id/index.php/adzkia/index>
- Nopyandri. (2011). “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No.1. 2011.

WEBSITE

Hiidayah, Kurniatul. (2022), Ketua Komisi A DPRD DIY: Masalah Sampah di DI Yogyakarta Harus Segera Ada Solusi. Diakses pada 31 Agustus 2022, dari [https:// jogja.tribunnews. com/ 2022/05/ 11/ketua-komisi-a-dprdiy-masalah-sampah-di-di-yogyakartaharus-segera-ada-solusi](https://jogja.tribunnews.com/2022/05/11/ketua-komisi-a-dprdiy-masalah-sampah-di-di-yogyakartaharus-segera-ada-solusi).

Sulaiman, M. Reza dan Lilis Varwati, (2022), Indonesia Hasilkan 175.000 Ton Sampah Tiap Hari, Sebagian Besarnya Sampah Rumah Tangga, Diakses pada 31 Agustus 2022, dari [https:// www.suara. com/ lifestyle/ 2021/ 11/17/ 063500/ indonesia- hasilkan- 175000-ton- sampah- tiap- harisebagian-besarnyasampah-rumah- tangga](https://www.suara.com/lifestyle/2021/11/17/063500/indonesia-hasilkan-175000-ton-sampah-tiap-harisebagian-besarnyasampah-rumah-tangga)